



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KECAMATAN ANDIR

RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
PERUBAHAN  
BERDASAR LOGIC  
MODEL

TAHUN 2018-2023

SESUAI DENGAN  
PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

## KATA PENGANTAR

**P**uji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Andir Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Andir diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, yang merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sejak Kepala Daerah Terpilih dilantik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Strategis Kecamatan Andir selama 5 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan Kecamatan guna mewujudkan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Akhirnya saya sampaikan semoga paparan yang tertulis rencana strategi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandung, 07 Desember 2021

Camat Andir,

  
**Budi Rahmat Taufik, A.P., M.M.**  
NIP 19730711 199403 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
RINGKASAN EKSKLUSIF	ii	
DAFTAR ISI	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	1
	Landasan Hukum	3
	Maksud dan Tujuan	5
	Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANDIR	8
	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Andir	9
	2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Andir	9
	2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Andir	12
	Sumber Daya Kecamatan Andir	14
	2.2.1 Sumber Daya Manusia	14
	2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja	15
	Kinerja Pelayanan Kecamatan Andir	17
	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Andir	28
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN ANDIR	31
	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
	Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bandung	38
	Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Jawa Barat	41
	3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri	41
	3.3.2. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024	42
	3.3.3. Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat	43
	3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
	3.4.1. Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031	45
	3.4.2. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 ( Periode IV)	49

	3.5. Penentuan Isu Strategis	56
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	61
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Andir	61
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	67
	5.1 Strategi Kecamatan Andir	67
	5.2 Analisis Logic Model	68
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
	6.1 Program dan Kegiatan Renstra 2013-2018	80
	6.2 Rencana Program dan Kegiatan Renstra 2018-2023	89
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN ANDIR	113
BAB VIII	PENUTUP	132



## 1.1 Latar Belakang

---

Sesuai amanat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun **Rencana Strategis** (RENSTRA) Perangkat Daerah secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja .

Penyusunan Renstra Kecamatan Andir Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra, dengan kegiatan-kegiatan Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD, Orientasi mengenai Renstra PD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD dan persiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kepada Sistem Informasi Pembangunan Daerah,
- b. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal
- c. Tahapan Penyusunan Rancangan

- d. Tahapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir dan
- f. Penetapan.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Andir selaku kepala Perangkat Daerah, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.

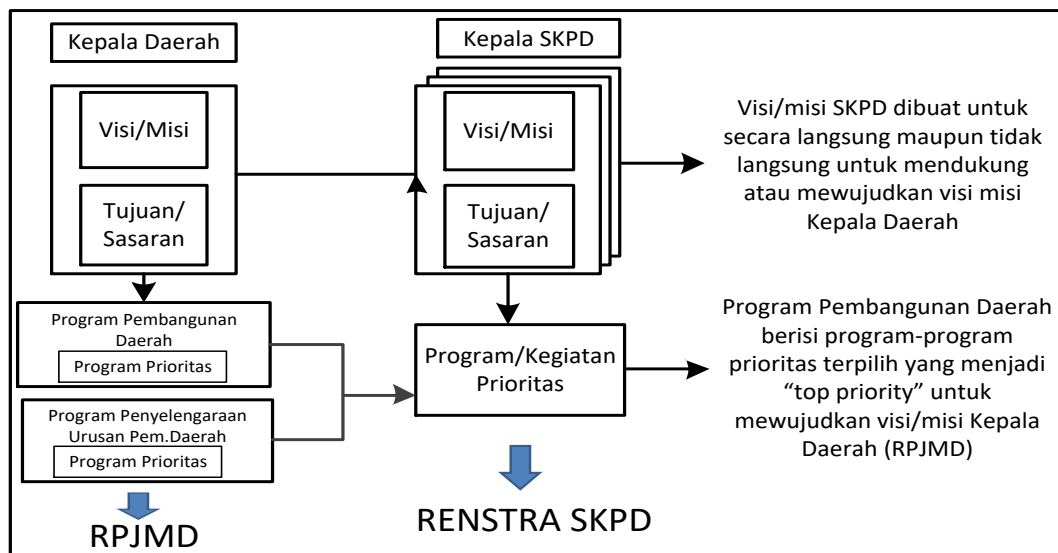
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi Perangkat Daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.

Renstra Kecamatan Andir disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Bandung yaitu Mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Bermartabat 2025, yang dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :

**Gambar 1-1**

**Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah**



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Kecamatan Andir Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
  19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
  28. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;
  29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
  30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
  31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

---

Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Andir Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Andir Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Andir Kota Bandung tahun 2018–2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Andir, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Andir Kota Bandung.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Andir Kota Bandung dalam menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023 yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Andir Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Andir Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

---

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Andir Kota Bandung Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Rentsra K/L dan Renstra provinsi/ Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah, Peraturan perundang undangan, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan. Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANDIR**

Gambaran Pelayanan Kecamatan Andir Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN ANDIR**

Bab ini menyajikan (1) Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, (2) Telaah Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (3) Telaah Renstra Kecamatan Andir dan Renstra Provinsi (4) Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan (5) Penentuan Isu-Isu Strategis.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah dari Kecamatan Andir.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Andir Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan mengenai rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja perangkat daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung.

## **BAB VIII PENUTUP**



## **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANDIR**

Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan ujung tombak keberhasilan tugas Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kecamatan juga berperan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Kecamatan yang mampu memberikan pelayanan terbaik serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Sebagai upaya untuk memperkuat Pemerintahan Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/ Wali Kota dan untuk Kota Bandung telah dikeluarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Wali Kota Bandung kepada Camat dan Lurah, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bidang urusan 124 (seratus dua puluh empat) rincian urusan.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Andir berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi sebagai dasar dalam menyusun berbagai kebijakan Kota Bandung yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Wali Kota Bandung kepada Camat dan Lurah sehingga dapat mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Wali Kota Bandung yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Gambaran umum Pelayanan Kecamatan Andir Kota Bandung merupakan deskripsi dari kondisi mengenai Kecamatan Andir Kota Bandung yang mencakup 4 (empat) aspek sebagai berikut:

- (i) Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Andir;
- (ii) Sumber daya Kecamatan Andir;
- (iii) Kinerja pelayanan Kecamatan Andir; dan
- (iv) Tantangan dan peluang pengembangan .

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Andir**

### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Andir**

---

Camat Andir mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Bandung untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di wilayah Kecamatan Andir. Tugas dan Fungsi Kecamatan Andir tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016.

Adapun rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan

10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;

13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

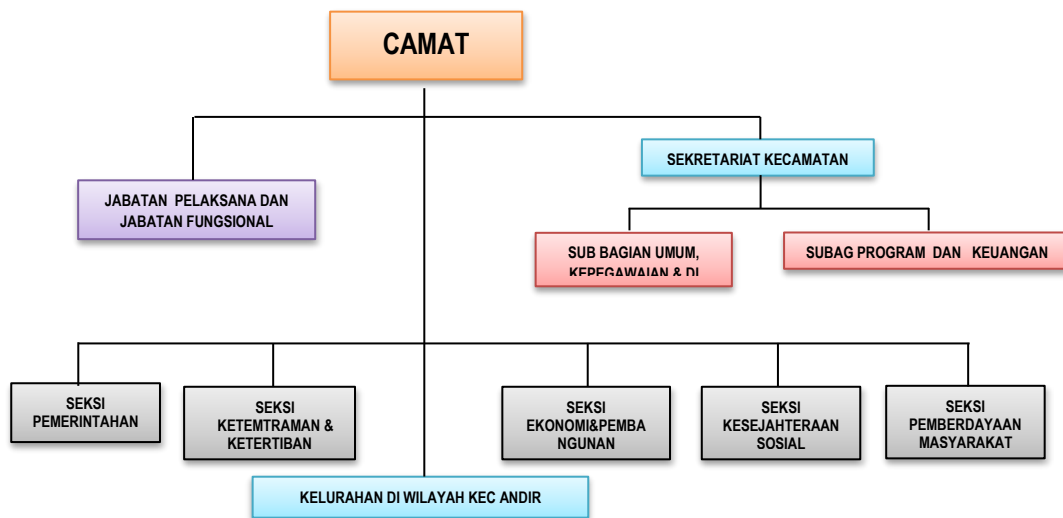
### 2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Andir

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung maka Susunan Organisasi Kecamatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari:
  - b.1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
  - b.2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber: Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016

Kecamatan Andir Kota Bandung dilihat dari perspektif geografis merupakan bagian dari pusat perkotaan sebelah barat Kota Bandung yang memiliki luas wilayah  $\pm 3,57 \text{ km}^2$ , dengan batasan wilayah meliputi:

- |                 |   |                                      |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| Sebelah Utara   | : | Kecamatan Cicendo                    |
| Sebelah Timur   | : | Kecamatan Sumur Bandung              |
| Sebelah Selatan | : | Kecamatan Bandung Kulon              |
| Sebelah Barat   | : | Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi |



Gambar 2.2

PETA WILAYAH KECAMATAN ANDIR



Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Andir dibagi dalam 6 Kelurahan, 54 RW dan 381 RT dengan rincian per kelurahan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Kelurahan, RW dan RT di Kecamatan Andir

No	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Maleber	11	62
2	Dunguscariang	11	84
3	Ciroyom	10	87
4	Kebon Jeruk	9	72
5	Garuda	6	38
6	Campaka	7	38
	<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>	<b>387</b>

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Andir Tahun 2018

Adapun Jumlah Penduduk Kecamatan Andir per bulan November 2018, tercatat sebanyak 105.001 jiwa, yang terdiri dari 51.774 jiwa laki-laki dan 53.227 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Andir saat ini sebanyak 23.253 KK.

Sedangkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, sebaran pendidikan penduduk di Kecamatan Andir adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak/belum sekolah : 13.341 orang
- 2) Tidak tamat SD : 10.441 orang
- 3) Tamat SD : 15.834 orang
- 4) SLTP : 19.438 orang
- 5) SLTA : 17.707 orang
- 6) Akademi/Sarmud : 14.206 orang
- 7) Sarjana : 8.869 orang

Sedangkan berdasarkan pekerjaan, sebaran penduduk di Kecamatan Andir adalah sebagai berikut :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1) Pegawai Negeri Sipil | : 6.271 orang  |
| 2) TNI/POLRI            | : 551 orang    |
| 3) Pegawai Swasta       | : 17.214 orang |
| 4) Wiraswasta/Pengusaha | : 745 orang    |
| 5) Buruh                | : 10.022 orang |
| 6) Petani               | : 75 orang     |
| 7) Pedagang             | : 20.364 orang |
| 8) Mahasiswa/Pelajar    | : 42.153 orang |

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Andir

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Andir Kota Bandung, Camat Andir dibantu oleh 58 pegawai yang tersebar di Kecamatan dan 6 Kelurahan di Wilayah Andir. Pada 31 Desember 2018, terdapat kekosongan 2 Pejabat Struktural Eselon IVa, dikarenakan pensiun selama periode tahun 2018 yaitu untuk jabatan Kasie Pemerintahan Kecamatan Andir, dan Lurah Garuda. Adapun komposisi pegawai di Kecamatan Andir dapat terlihat dalam tabel komposisi pegawai berdasarkan eselon berikut ini :

Tabel 2.5  
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan  
Kecamatan Andir

No	Uraian	Eselon IIIa	Eselon IIIb	Eselon IVa	Eselon IVb	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Andir	1	1	4	2	14	22
2	Kelurahan Campaka	-		1	4	1	6
3	Kelurahan Ciroyom	-		1	4	2	7
4	Kelurahan Maleber	-		1	4	1	6
5	Kelurahan Kebon Jeruk	-		1	4	1	6
6	Kelurahan Dungsucariang	-		1	4	1	6
7	Kelurahan Garuda	-		0	4	1	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>58</b>

Sumber: Kecamatan Andir Tahun 2018

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Andir Kota Bandung, sebanyak 4 orang (6,9%) memiliki pendidikan S2, sebanyak 30 orang

(51,72%) yang memiliki pendidikan S1, sebanyak 2 orang (3,45%) yang memiliki pendidikan D3, sebanyak 20 orang (34,48%) yang memiliki pendidikan SLTA, sebanyak 1 orang (1,72%) yang memiliki pendidikan SLTP, sebanyak 1 orang (1,72%) yang memiliki pendidikan SD. Uraian diatas dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6  
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Kecamatan Andir

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Andir	-	3	10	2	7	-	-	22
2	Kelurahan Campaka	-	-	3	-	3	-	-	6
3	Kelurahan Ciroyom	-	-	3	-	4	-	-	7
4	Kelurahan Maleber	-	1	2	-	2	1	-	6
5	Kelurahan Kebon Jeruk	-	-	4	-	1	-	1	6
6	Kelurahan Dunguscariang	-	-	5	-	1	-	-	6
7	Kelurahan Garuda	-	-	3	-	2	-	-	5
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>58</b>

Sumber: Kecamatan Andir Tahun 2018

Dilihat dari komposisi jumlah pegawai di Kecamatan Andir, terdapat kekurangan untuk komposisi staf, seperti yang tergambar di Kelurahan Garuda sehingga mengakibatkan Plt. Lurah Garuda harus dipegang oleh Sekretaris Lurah Garuda.

### 2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Andir Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana terbagi dalam berbagai bidang terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Bidang Kesehatan pada Kecamatan Andir

No	Prasarana	Jumlah
1	Rumah Sakit	3
2	Rumah Bersalin/BKIA	2
3	Dokter Umum	26

4	Dokter anak	6
5	Dokter kandungan	14
6	Dokter Gigi	16
7	Dokter spesialis lainnya	18
8	Dokter Hewan	-
9	Puskesmas	2
10	Klinik/Balai Pengobatan	23
11	Apotik	18
12	Toko Obat	10
13	Posyandu	77

Sumber: Kecamatan Andir Tahun 2018

Tabel 2.8

Bidang Olah Raga Kecamatan Andir

No	Lapangan	Jumlah
1	Sepak Bola	5
2	Bulutangkis	18
3	Tenis Meja	20
4	Voli	14
5	Basket	7
6	Tenis lapangan	1
7	Futsal	3

Sumber: Kecamatan Andir Tahun 2018

Tabel 2.9

Bidang Ekonomi Kecamatan Andir

No	Uraian	Jumlah
1	Koperasi	35
2	UKM	831
3	Pasar Selapan/Umum	4
4	Usaha Perdagangan	1769
5	Toko/Swalayan	2062
6	Warung Makan	229
7	Restaurant	70
8	Kios/Warung Kelontong	2084
9	Pedagang kaki Lima	2946

10	Bank	12
11	Industri Makanan	162
12	Industri Kerajinan	24
13	Industri Pakaian	119
14	Perusahaan Angkutan	26
15	Percetakan/Sablon	42
16	Bengkel Motor/Sepeda	75
17	Bengkel Mobil	43

*Sumber: Kecamatan Andir Tahun 2018*

### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Andir**

---

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wali Kota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Andir dapat melaksanakan pelayanan secara maksimal kepada Masyarakat. Adapun gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Andir dalam renstra tahun 2013-2018 berdasarkan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dapat disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.10  
Pecapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Andir  
Kota Bandung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Andir Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(dalam %)														
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat				81	81.25	81.33	81.30	n/a	82	85.99	81.91	n/a	n/a	101,23 %	104.871%	<b>100.71%</b>	n/a	n/a
2	Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>	n/a	n/a
3	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI				850	900	910	n/a	n/a	895	950	950	n/a	n/a	108,48%	105,56%	<b>104,40%</b>	n/a	n/a
4	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu				70	70	82.62	n/a	n/a	78.30	70	n/a	n/a	n/a	111.86%	100%	<b>n/a</b>	n/a	n/a
5	Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu				75	75.25	81.70	n/a	n/a	85.63	75.25	100	n/a	n/a	114.17%	100,00%	<b>100,00%</b>	n/a	n/a
6	Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik				70	83.33	86	n/a	n/a	66.66	83.33	100	n/a	n/a	125%	100,00%	<b>100%</b>	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Andir Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(dalam %)					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					1	2	3	4	5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Prosentase RW Juara				50	74.07	77.77	n/a	n/a	70.37	74.07	63,22	n/a	n/a	101,83%	100,00%	<b>103,13%</b>	n/a	n/a
8	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif				25	70	70.71	n/a	n/a	66.66	70	90,48	n/a	n/a	102,04%	101,59%	<b>113,10%</b>	n/a	n/a
9	Rasio Anggota Linmas				084: 1	1:085	1:0.86	n/a	n/a	0,842: 1	1:1,00	1:1.01	n/a	n/a	100,24%	117,65%	<b>117,14%</b>	n/a	n/a
10	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				n/a	n/a	n/a	81.30	81.30	n/a	n/a	n/a	81.38	82.54	n/a	n/a	n/a	100.10%	101,53%
11	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				n/a	n/a	n/a	75	75	n/a	n/a	n/a	77.20	79.04	n/a	n/a	n/a	102.90%	105.38%
12	Nilai Evaluasi AKIP				50,0 1	65,10	68,50	n/a	n/a	50,08	60,77	68,79	n/a	n/a	100,14%	93,35%	<b>100,42%</b>	n/a	n/a
13	Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100%	100,00%	<b>100%</b>	n/a	n/a

Sumber Data : LAKIP Kecamatan Andir Tahun 2014 s.d Tahun 2018

Interpretasi dari Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan adalah sebagai berikut indikator kinerja pelayanan di Kecamatan Andir selama Renstra 2013-2018 mengalami perubahan, dimana selama tahun 2014 s.d 2016 jumlah indikator kinerja yang diukur berjumlah 10 indikator sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 hanya sebanyak 2 indikator kinerja, dikarenakan adanya revisi Renstra Kota Bandung sesuai dengan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung.

Indikator Kinerja Kecamatan di akhir Renstra 2013-2018 menjadi 2 indikator yaitu :

1. Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
2. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Kecamatan Andir dalam dua tahun terakhir ini mampu mencapai kinerja melebihi dari 100% ini dapat terlihat dari pencapaian indikator pertama yaitu rata-rata IKM sebesar 100.10% di tahun 2017 dan 101,53% pada tahun 2018. Sedangkan untuk tingkat pemberdayaan sebesar 102.90% di tahun 2017 dan 105.39% pada tahun 2018.

Untuk pencapaian realisasi anggaran selama periode Renstra 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.11  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Andir Kota Bandung  
Tahun 2013-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12	13	14	15	16	17 = (6-2)/5	18 = (11-7)/5
BELAJA	16,323,315,900.00	24,520,778,521.00	24,221,704,953.00	29,189,603,399.00	28,963,708,822.04	11,449,682,043.00	22,544,800,194.00	23,459,822,868.00	28,325,468,676.00	27,474,087,501.00	70.14	91.94	96.85	97.04	94.86	2,528,078,584.41	3,204,881,091.60
BELAJA TIDAK LANGSUNG	5,712,715,900.00	6,771,013,581.00	7,683,927,027.00	11,671,379,309.00	14,059,416,896.00	5,268,443,717.00	6,250,453,708.00	7,374,106,281.00	11,478,541,574.00	13,761,208,545.00	92.22	92.31	95.97	98.35	97.88	1,669,340,199.20	1,698,552,965.60
BELAJA LANGSUNG	10,610,600,000.00	17,749,764,940.00	16,537,777,926.00	17,518,224,090.00	14,904,291,926.04	6,181,238,326.00	16,294,346,486.00	16,085,716,587.00	17,846,927,102.00	13,712,878,956.00	58.25	91.80	97.27	101.88	92.01	2,768,646,385.21	1,506,328,126.00

Sumber Data : Simda Keuangan Tahun 2014-2018

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Andir**  
**Tahun 2013-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	873,476,000	1,298,082,650	2,408,651,162	1,871,836,397	1,726,297,053	830,473,825	1,061,594,900	2,211,554,581	1,791,745,641	1,586,891,547	93.30	81.97	91.82	95.72	91.92
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	5,111,158,986	4,280,884,600	1,435,127,850	2,497,345,320	943,142,839	1,071,101,431	3,955,202,754	1,389,221,358	2,226,762,279	816,909,844	16.57	91.43	96.80	89.17	86.62
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	128,600,000	162,600,000	119,495,600	-	88,877,250	125,740,500	144,529,000	112,629,000	-	86,518,130	97.78	88.89	94.25	-	97.35
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	115,204,000	80,000,000	142,102,500	-	-	59,990,000	75,676,000	135,987,500	-	-	52.07	94.60	95.70	-	-
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	35,000,000	63,400,000	125,015,860	-	-	32,160,000	63,180,000	122,423,500	-	-	-	99.65	97.93	-	-
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	249,000,000	337,500,000	-	-	-	152,041,500	286,541,540	-	-	-	-	84.90	-	-	-

<b>Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta pembangunan bangunan</b>	-	300,000,000	-	-	-	-	295,680,000	-	-	-	-	98.56	-	-	-
<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	-	8,312,600,000	7,200,000,000	7,194,444,377	6,006,278,126	-	7,715,084,417	7,111,173,178	6,955,242,292	5,307,059,835	-	-	98.77	96.68	88.36
<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	4,098,161,014	2,914,697,690	5,107,384,954	5,954,597,996	6,139,969,658	3,909,731,070	2,696,857,875	5,002,727,470	5,873,176,890	5,915,499,600	91.83	98.00	97.93	98.56	96.59
<b>Kegiatan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan</b>	88,000,000	101,600,000	261,385,000	295,118,800	168,999,000	69,355,000	94,525,000	245,087,400	280,026,650	158,649,500	74.32	99.92	93.76	94.89	93.88
<b>Fasilitas Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan</b>	500,161,014	462,520,000	916,975,000	545,097,500	-	477,785,000	446,992,000	896,990,750	532,693,000	-	90.93	96.64	97.82	97.72	-
<b>Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	234,500,000	254,915,000	1,031,772,394	2,307,469,388	2,671,985,130	186,095,200	248,818,750	1,007,571,900	2,303,159,540	2,576,677,000	80.64	97.61	97.65	99.81	96.43

<b>Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	505,000,000	406,422,690	1,169,282,560	460,845,000	161,844,200	502,394,000	401,796,750	1,166,702,520	460,006,000	161,455,000	99.48	98.86	99.78	99.82	99.76
<b>Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan</b>	85,000,000	118,700,000	1,416,185,000	2,028,573,000	2,074,126,800	83,762,000	113,951,000	1,394,715,000	2,024,084,000	2,042,608,800	98.54	96.00	98.48	99.78	98.48
<b>Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan</b>	2,545,500,000	1,280,640,000	-	-	-	2,451,350,370	1,102,365,500	-	-	-	-	85.84	-	-	-
<b>Fasilitasi Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat</b>	140,000,000	289,900,000	311,785,000	-	-	138,989,500	288,408,875	291,659,900	-	-	-	99.49	93.55	-	-
<b>Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	-	-	-	317,494,308	583,705,528	-	-	-	273,207,700	528,478,400	-	-	-	86.05	90.54
<b>Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>					479,036,000					447,630,900					

Sumber Data : Simda Keuangan Tahun 2014-2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya rasio penyerapan dana baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung hampir mendekati angka 100%. Penyerapan anggaran di akhir tahun pelaksanaan Renstra mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai 94,56% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 97.88% dan Belanja Langsung sebesar 92,01 %.

Penurunan penyerapan anggaran di akhir tahun renstra diakibatkan karena tidak disetujuinya Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diakibatkan karena keterlambatan pencapaian RAPBD Perubahan Kota Bandung ke Provinsi, sebagai akibatnya kegiatan yang sudah direncanakan di dalam anggaran perubahan tidak terealisasi.

Capaian program dan kegiatan di Kecamatan Andir selama Renstra Tahun 2013-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

**1. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan”.**

➤ **Rencana :**

- 1) Output yang direncanakan, yaitu : Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat melalui : Pendataan dan pembinaan Koperasi, peningkatan pemahaman dan promosi usaha melalui pembinaan UKM.

➤ **Realisasi.**

- 1) Output yang direalisasikan, yaitu
  - a) Terlaksananya Pembinaan UKM, Koperasi masing-masing sebanyak 4 kali kegiatan berupa Sosialisasi Peningkatan Peran UKM dan Kegiatan Cullinary Night sebagai sarana promosi UKM di Wilayah Kecamatan Andir
  - b) Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Koperasi, masing-masing sebanyak 5 kali kegiatan.

**2. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan”.**

Kegiatan ini direncanakan selama 4 tahun sedangkan di tahun ke 5 kegiatan ini dipecah menjadi 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial

➤ **Rencana :**

- 1) Output yang direncanakan, yaitu : Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui : pendataan penyandang cacat, serta pembinaan RBM dan Posyandu.

➤ **Realisasi.**

- 1) Output yang direalisasikan, yaitu
  - a) Terlaksananya Pendataan Penyandang Cacat, sebanyak 4 kali kegiatan.
  - b) Terlaksananya pembinaan RBM, sebanyak 4 kali pembinaan.
  - c) Terlaksananya pembinaan Posyandu, setiap tahun pembinaan per kelurahan.

**3. Analisis efisiensi “Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”**

➤ **Rencana :**

- 1) Output yang direncanakan, yaitu : Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan Infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat, melalui musrenbang kecamatan dan musrenbang kelurahan, Pemeliharaan fasilitas umum dan sosial lingkungan RW di kelurahan seperti pemeliharaan kerb jalan, kegiatan pembersihan sungai, serta pengadaan alat biofori, tempat sampah dan Sumur Resapan.

➤ **Realisasi.**

- 1) Output yang direalisasikan, yaitu
  - a) Terlaksananya Musrenbang, sebanyak 5 tahun pelaksanaan baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan .
  - b) Terlaksananya Penyusunan data pembangunan kecamatan, setiap tahun .
  - c) Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kelurahan, setiap tahun.
  - d) Terlaksananya penyuluhan lingkungan yang bersih dan sehat sebanyak 4 kali pelaksanaan.
  - e) Pemeliharaan Kirmir dan Kerb di jalan Lingkungan
  - f) Pembuatan sumur resapan
  - g) Pengadaan alat biofori

4. Analisis efisiensi **“Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”**

➤ **Rencana :**

- 1) Output yang direncanakan, yaitu : Terlaksananya kegiatan yang menunjang peningkatan ketentraman dan ketertiban, berupa : pembinaan Linmas, Satwankar serta Ormas dan Penataan PKL di Zone Merah ( Kelurahan Cicadas ).

➤ **Realisasi.**

- 1) Output yang direalisasikan, yaitu :
  - a) Terlaksananya Pembinaan Ormas dan OKP setiap tahun yang diadakan di kelurahan dan kecamatan.
  - b) Terlaksananya Pembinaan Linmas, setiap tahun di tingkat Kecamatan.
  - c) Terlaksananya Pembinaan Satwankar setiap tahun di tingkat Kecamatan
  - d) Pendataan PKL dan Pembinaan PKL

5. Analisis efisiensi **“Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan”**

➤ **Rencana :**

- 1) Output yang direncanakan, yaitu : Terfasilitasinya kegiatan terhadap bidang penyelenggaraan Pemerintahan umum berupa : Pembuatan profil Monografi dan data Monografi, pembinaan RT/RW, pembinaan kelurahan siaga serta pemberian honorarium RT dan RW sesuai kebijakan Wali Kota terpilih.

➤ **Realisasi.**

- 1) Output yang direalisasikan, yaitu :
  - a) Tersedianya data monografi Kecamatan dan Kelurahan
  - b) Terlaksananya pembinaan RT dan RW, setiap tahun di setian kelurahan dan kecamatan
  - c) Terlaksananya Pemilihan kelurahan terbaik, selama lima tahun.

6. Analisis efisiensi **“Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat”**

➤ **Rencana :**

Output yang direncanakan, yaitu : Terasilitasinya kegiatan terhadap bidang penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat berupa : sosialisasi Perda Kependudukan, pendataan penduduk musiman, pemutakhiran data penduduk serta pendampingan operasi Yustisi Kependudukan.

➤ **Realisasi.**

Output yang direalisasikan, yaitu :

- a) Terlaksananya sosialisasi perda kependudukan, setiap tahun.
- b) Terlaksananya pendataan penduduk musiman, setiap tahun.
- c) Terlaksananya pemutakhiran data penduduk, setiap tahun.
- d) Penyisiran warga yang belum melaksanakan perekaman e-ktp setiap tahun.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Andir**

---

Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Andir mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- 1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;



- 6) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- 7) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Andir harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- 8) Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- 9) Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- 10) Pemberdayaan masyarakat menjadi salahsatu peran penting bagi peran Kecamatan dan Kelurahan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Andir dari hasil telaahan Perda no 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Dalam Perda tersebut kecamatan Andir berada dalam Kawasan Perumahan dan Perdagangan dengan kepadatan tinggi, maka tantangan dan peluang yang diidentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Tantangan**

1. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Andir;
2. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
5. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Masih tingginya angka pengangguran;
7. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Andir belum tertata dengan baik.
8. Terdapatnya zona merah PKL di Jalan Rajawali Timur, Jalan Waringin dan Jalan Otto Iskandar Dinata yang memerlukan penanganan yang cukup serius yang berakibat pada tingkat kemacetan yang cukup tinggi.

9. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Andir masih perlu ditingkatkan lagi;
10. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal.

**Peluang**

1. Penduduk Kecamatan Andir memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan;
2. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Andir Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan disamping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.



## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN ANDIR

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kota yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah

guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diuraikan berikut ini.

1. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Andir pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan tahun 2017, dari target sebesar 81,30 terealisasi sebesar 81,38, dimana semua unit kerja mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun demikian standar pelayanan publik di Kecamatan Andir perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi tangible. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Andir sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Andir saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan terutama di Kelurahan Campaka, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Ciroyom , Kelurahan Garuda, Kelurahan Maleber dan Kelurahan Dunguscariang dimana terjadi pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang,

sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah;

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Andir merupakan salah satu SKPD di dalamnya.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Andir dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

- a) Ruang pelayanan yang belum memadai terutama di Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kecamatan Andir dimana gedung kantor kurang representatif adapun sarana dan prasarananya belum memenuhi fasilitas pendukung yang diharapkan seperti Informasi pelayanan melalui teknologi Media perkantoran.
- b) Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 80%;
- c) Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- d) Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
- e) Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
- f) Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
- g) Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
- h) Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola).
- i) Masih rendahnya tingkat partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan kewilayahan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Andir, sebagai berikut

- a) Sumber Daya Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan masih mengandalkan Non ASN;
- b) Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
- c) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

- d) Kurangnya partisipasi ASN dalam membuat rencana strategis Kecamatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Andir sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Andir, **masalah internal** yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Andir Kota Bandung antara lain :

- a) Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja, ditandai dengan adanya kekosongan pejabat structural baik di kecamatan maupun kelurahan serta adanya kelurahan yang tidak mempunyai staf pelaksana;
- b) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
- c) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
- d) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Andir Kota Bandung adalah:

- a) Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK belum secara spesifikasi;
- b) outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
- c) Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;
- d) Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- e) Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu

pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);

- f) Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan., terutama di daerah Kelurahan Ciroyom, Kelurahan Campaka dan Kelurahan Kebon Jeruk.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Andir Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut:

1. **Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. **Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang

lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Andir dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

### **3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan



lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### **4. Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah:

- a. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- c. Pengamanan barang daerah;

- d. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bandung**

---

**Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

## **“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap

memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,

**Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke

dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

**Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. **Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing**

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani**

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima

3. **Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

4. **Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan

pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. **Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi**

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

### **3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Propinsi Jawa Barat**

---

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi:

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Andir tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Andir adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Andir.

### 3.3.2 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.***

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

**Gambar 3.1**  
**Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

### **3.3.3 Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat**

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

#### **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

**Jabar Juara Lahir Batin:** pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

**Inovasi :** pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

**Kolaborasi :** perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan **beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023**, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

**“Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”**

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID-19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 + 9, meliputi:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-1;  
dan 9 prioritas pembangunan, yaitu:



1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

---

#### **3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031**

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

##### **A. Rencana Struktur Ruang**

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

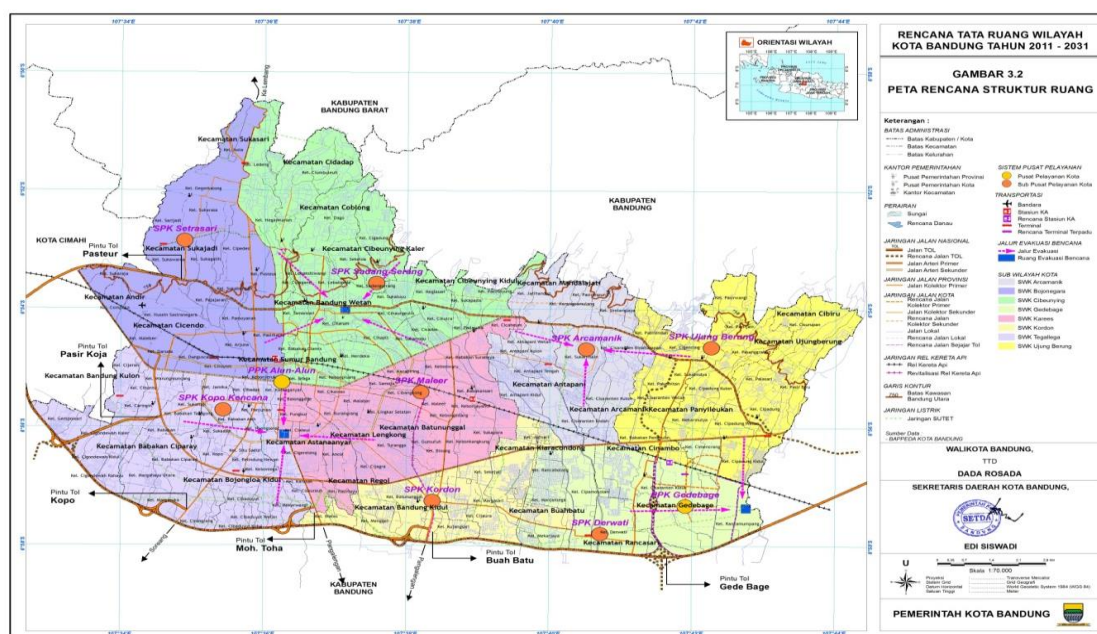
- a. Subwilayah Kota Bojonegara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Andir, Andir;
- c. Subwilayah Kota Tegalega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;

- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.1

Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



## B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan

lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

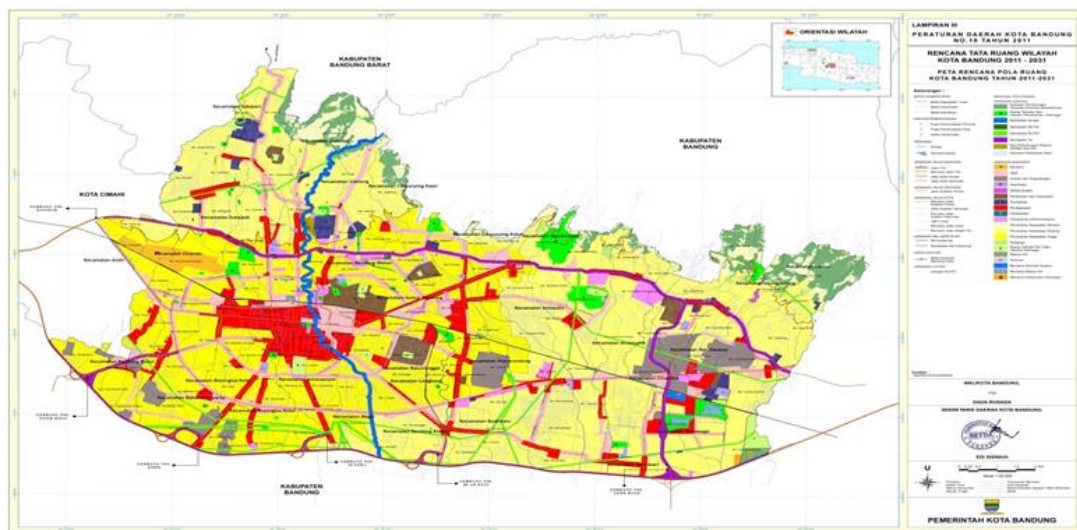
- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan

- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.2

Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



### 3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD.

RPJPD Kota Bandung 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Berikut hasil telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023.

**Tabel 3.1**  
**Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025**  
**Periode Perencanaan Tahun 2013-2018**

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
1	Terwujudnya Sumber daya manusia yang handal dan religius	Terkendalnya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IPM	82,02	80,31	Realisasi IPM termasuk tinggi, namun fertilitas masih tinggi.
			Jumlah penduduk (maksimal)	2.835.223 Jiwa	2.499.809	
			Angka fertilitas	1,85	1,96	
		Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif	Indeks pendidikan	93,53	Realisasi penerapan SPM melampaui target, namun rata-rata lama sekolah masih rendah.	
			Rata-rata lama sekolah	12,17 Tahun		10,59
			Sertifikasi guru	75%		100%
			Lembaga pendidikan di Kota Bandung yang telah menerapkan SPM	75%		
		Angka melek huruf	99,73 %	98,26%		
		Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani	Indeks kesehatan	81,87	Semua fasilitas kesehatan telah memenuhi SPM, namun tingkat kematian bayi/ibu masih tinggi.	
			Angka harapan hidup	74,45		73,86
			Fasilitas kesehatan yang telah memenuhi SPM	90%		100
			Angka kematian bayi	29/1000		66
			Jumlah kematian ibu melahirkan	11 orang/tahun		16
		Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia	Pemaparan zoonosis di wilayah Kota Bandung	Kurang dari 12 %	Tidak ada kasus	
			Tingkat pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	N/A	Data realisasi tidak tersedia.
Tingkat Kerukunan umat beragama meliputi Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan Antar Umat Beragama, Kerukunan Antara umat beragama dengan Pemerintah	Terwujudnya Sikap toleransi dan Kerukunan Umat Beragama					
	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	Tingkat pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Terwujudnya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	IPG pada tahun 2017 mencapai 95,52.	Realisasi IPG termasuk tinggi namun data realisasi hak-hak perlindungan perempuan dan anak tidak tersedia.	
	Tingkat hak-hak perlindungan perempuan dan anak	Terwujudnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak				
2	Terwujudnya perekonomian kota	Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya	Laju pertumbuhan ekonomi	10,33%	N/A	Kondisi perekonomian
			Tingkat pemerataan pendapatan versi	minimal 16% (kategori		

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
	yang berdaya saing	saing serta sehat dan berkeadilan	Bank Dunia	sedang)		cukup bagus namun tingkat pengangguran terbuka masih tinggi.
			PDRB riil/kapita	minimal Rp 20 juta per tahun	N/A	
			Indeks daya beli	70,66		
			Tingkat inflasi umum	satu digit	3,46	
			Tingkat pengangguran terbuka	maksimal 12%	8,44	
			Kesempatan kerja	minimal 92%		
		Nilai investasi berskala nasional	meningkat 40%			
		Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing	Jumlah wisatawan	35%		Data realisasi tidak tersedia.
		Terwujudnya kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah Daerah lainnya	Sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah	Tumbuhnya kegiatan ekonomi antar daerah		
3	Terwujudnya kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani.	Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung	Akses informasi tentang pembangunan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tahapan proses pembangunan		Data realisasi tidak tersedia.
			Tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	Meningkatnya Rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik		
		Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan Sunda yang inklusif	Pengembangan pusat – pusat kebudayaan	Terwadahnya heterogenitas budaya dalam lingkungan Budaya Sunda		Data realisasi tidak tersedia.
			Sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Optimalnya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian budaya		
4	Terwujudnya lingkungan hidup kota yang berkualitas	Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu	Lokasi sampel yang telah memenuhi BM kualitas udara	50% lokasi/sample telah memenuhi BM	100 % lokasi/sampel telah memenuhi Baku Mutu	Kualitas udara dan air cukup baik.
			Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)	Sungai dan anak sungai di Kota Bandung yang telah memenuhi baku mutu untuk parameter BOD dan COD	17 % sungai dan anak sungai	0 % sungai dan anak sungai Kota Bandung yang parameter COD dan BOD nya memenuhi baku mutu air kelas II pada PP No. 82 Tahun 2001
		Kapasitas produksi air bersih dari		sebesar ± 5.750 liter/detik	N/A	

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
			sumber air baku Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya)	23%	Indikator persentase RTH dalam kondisi baik di Kota Bandung dari target tahun 2017 sebesar 45,50% dan realisasi capaian kinerja 44,32%	
		Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi	Reduksi dan Peningkatan pemanfaatan kembali limbah padat	90% sampah dapat dikelola (30 % reuse, reduce dan recycle, 60% ke pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis 35 % , dan landfill 25 %).	Pada tahun 2017, 97,47 % sampah dapat ditangani (17,8 % reuse, reduce dan recycle, 1,4 % dimanfaatkan menjadi sumber energi dan 78,27 % ke pemrosesan akhir secara landfill)	Realisasi pengelolaan sampah cukup baik, namun besarnya persentase pemrosesan landfill perlu dikaji ulang.
		Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Terbentuk struktur ruang kota	Minimum 60% Kawasan Pusat Primer Gedebage terbangun dan semua Pusat WP berfungsi efektif	Keterbangunan PPK Gedebage mencapai 51,68 % (Pengukuran tingkat keterbangunan infrastruktur PPK Gedebage dilakukan melalui 280 LKPJ Akhir Masa Jabatan 2013 – 2018 pendekatan 4 (empat) komponen, yaitu perencanaan dan perizinan (diberikan bobot 75%), pengadaan lahan (diberikan bobot 50%), proses konstruksi (diberikan bobot 75%) dan lahan yang sudah terbangun (diberikan bobot 100%).	Realisasi keterbangunan dan pelayanan perizinan sesuai peraturan belum memenuhi target.
			Pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Pencapaian target mencapai 85 % (dihitung dengan pengukuran berdasarkan 3 (tiga) aspek, antara lain: perencanaan, berupa ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	



No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
					(RTRW, RDTR, dan Peraturan Wali Kota) sebesar 40%, pemanfaatan ruang (implementasi dokumen perencanaan antara lain perizinan, pertanahan, dan lain sebagainya) sebesar 30%, serta aspek pengawasan dan pengendalian tata ruang, persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan sebesar 15%.)	
		Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan	Pengembangan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota	Luas jalan min 4 % dari wilayah kota dan 100% berkondisi baik	persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik dengan target 100,00% realisasinya sebesar 100,00% atau terealisasi sebesar 100% melalui peningkatan jalan sepanjang 52.463,85 m, rehabilitasi jalan sepanjang 25.045,97 m, dan pemeliharaan jalan seluas 301.839,59 m <sup>2</sup> .	Sistem transportasi belum memenuhi target yang ditentukan terutama aspek penyebab kemacetan.
			Indeks aksesibilitas	Indeks aksesibilitas minimum 7 km/km <sup>2</sup> area	7,74 dari target revisi RPJMD sebesar 7,47	
			Terwujudnya prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota	50% dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai dengan rencana induk transportasi kota	Target sebesar 25:75 dengan realisasi sebesar 19,5 : 80,5 capaiannya masih di bawah target	
			Teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan (dari 32 aspek)	Teratasinya Aspek-aspek penyebab kemacetan sebanyak 10 Aspek*		
		Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan minimal	Penduduk kota yang dilayani air bersih dengan pengaliran kontinu 24 jam	85% penduduk dilayani Air bersih dengan standar 120 liter/orang /hari dengan pengaliran kontinu 24 jam	N/A	Sarana dan prasana (infrastruktur) belum optimal melayani kebutuhan

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
			Berfungsinya TPA sampah yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sudah berfungsi 100%.	Kota Bandung sampai saat ini belum memiliki TPA Sampah secara mandiri dan masih dibuang ke TPAS Sarimukti	masyarakat.
			Penataan sistem drainase Kota yang tertata	Jaringan drainase primer dan sekunder kota terpadu; integrasi per wilayah pelayanan drainase kota; 75% sistem drainase kota terpadu	N/A	
			Kawasan kota yang terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL	75% kawasan kota terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL	Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem offsite dan onsite dari target 72 % realisasi sebesar 79,09 %	
		Terwujudnya mitigasi Bencana yang handal	Peningkatan pengelolaan bencana	Meningkatnya penanganan bencana		Data realisasi tidak tersedia.
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan	Terwujudnya peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan data base	Tingkat kualitas aparatur perencana dan pengelola data	Meningkatnya perencanaan dan pengelolaan data.		Data realisasi tidak tersedia.
		Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM	Tingkat kualitas produk hukum yang produktif dan implementatif	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat dalam penerapan produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		Data realisasi tidak tersedia.
6	Terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu	Terwujudnya anggaran pemerintah yang optimal	Peningkatan Pendapatan Daerah	Rata-rata peningkatan Pendapatan 17%	Rata-rata peningkatan pendapatan daerah 16,5%.	Rata-rata peningkatan pendapatan cukup baik, namun pengembangan
			Sinergitas APBN, APBD Propinsi & APBD Kota	APBN, APBD Prov & APBD Kota terintegrasi sepenuhnya	N/A	

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
			Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional	Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non konvensional mulai signifikan	Belum terdapat obligasi daerah & road fund	instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional / kreatif belum optimal.
		Terwujudnya masyarakat dan sektor swasta berperan besar dalam pembiayaan pembangunan kota	Pengembangan sistem insentif terhadap swasta	Berbagai insentif fiskal tersedia untuk fasilitasi sektor swasta	Belum terumuskan	Peran masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan kota belum dibangun dengan baik.
			Pengembangan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta	Berfungsinya perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum & barang publik	Belum terbentuk	
			Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional	Berfungsinya instrumen pembiayaan pembangunan non konvensional berbasis masyarakat	Belum terbangun instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional	
			Penyediaan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa publik	Berbagai insentif fiskal tersedia untuk fasilitasi masyarakat dalam pembangunan, pelaksanaan dan pemeliharaan, barang & jasa publik tersedia	Belum terdapat insentif	

Sumber: RKPD Kota Bandung Tahun 2005-20025, LKPJ AMJ Wali Kota Bandung Tahun 2013-2018

### 3.5 Penentuan Isu Strategis

---

Isu Strategis ditentukan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Andir Kota Bandung, terutama yang berkaitan dengan fungsi pelayanan. Pada Pemerintah Kecamatan Andir ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk dijadikan dasar isu strategis. Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kecamatan Andir yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Andir Kota Bandung pada tahun 2019 antara lain:

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang harus disertai dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen bersama.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif agar tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan SDM aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan membangun komitmen bersama untuk melaksanakan TUPOKSI dapat berdaya guna, berhasil guna untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Andir Kota Bandung, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 9 Isu strategis Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Isu Lingkungan Hidup
  - a. Pencemaran lingkungan
  - b. Banjir cileuncang
  - c. Penimbunan sampah
  - d. Penyediaan RTH
2. Isu Infrastruktur
  - a. Kemacetan lalu lintas
  - b. Ketersediaan transportasi umum
  - c. Buruknya drainase lingkungan
  - d. Kualitas jalan
3. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
4. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin
5. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran
6. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga
7. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
8. Isu Perkembangan teknologi dan informasi
9. Isu Reformasi Birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Andir dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Andir Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis**

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.		<p><b>1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)</b></p> <p>Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.</p>
2.		<p><b>2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur</b></p> <p>Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excellent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Andir dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan,</p>

		<p>penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparaturnya pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i>.</p> <p><b>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</b></p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparaturnya kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i></p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p>
3.		<p><b>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</b></p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan</p>

		<p>Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p>
--	--	--





## **TUJUAN DAN SASARAN**

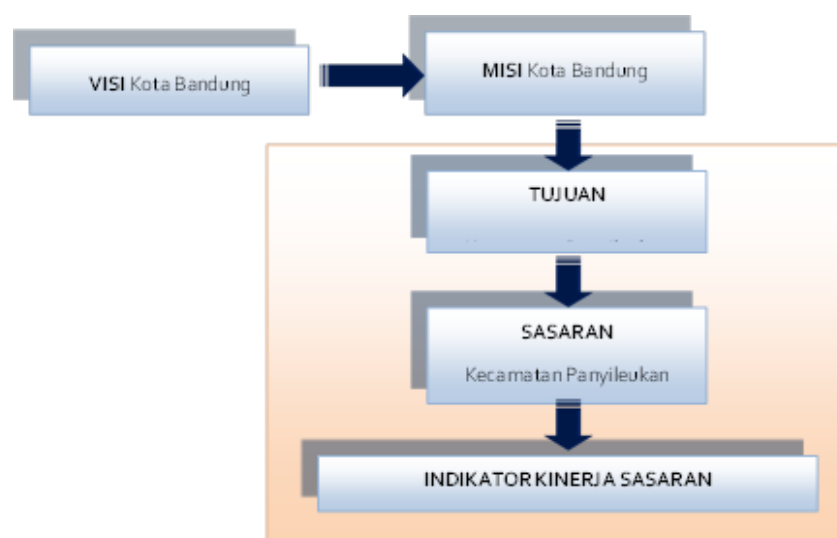
### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Andir**

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai Visi dan Misi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Andir menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis Kecamatan Andir.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Andir Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Gambar 4.1  
Alur Kaitan Visi dan Misi Kota Bandung dengan  
Fungsi Kecamatan Andir:



**Tabel 4.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Andir</b>		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Andir	81,5	81,6	81,7	81,8	83,0
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Andir	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Andir	81,5	81,6	81,7	81,8	83,0
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	33.33	38.46	38.46	46.15	53.85
2	<b>Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat</b>		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	33.33	56.36	56.36	59.19	61.00
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	33.33	56.36	56.36	59.19	61.00

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani, hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena di atas adalah pemerintah berkewajiban membangun sebuah kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima menjadi dasar bagi pencapaian misi Kecamatan Kecamatan Andir dengan aparat yang

profesional. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintah yang akuntabel.

Tujuan pertama berkaitan dengan Membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) dengan sasaran pertama yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai A pada tahun 2018 sesuai dengan realisasi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Dan menjadi sasaran strategis pada Renstra Kecamatan Andir 2018-2023.

Tujuan kedua yaitu Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Rata-rata tingkat inovasi lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) dengan target skala tinggi pada tahun 2018 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2017-2018, Dan menjadi sasaran strategis pada Renstra Kecamatan Andir 2018-2023.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Andir Kota Bandung 2018-2023 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Andir Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Andir Kota Bandung.

Berdasarkan Latar Belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 antara lain, dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Rancangan Akhir, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-

2023, Rekomendasi Kemenpan RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para Akademisi, terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan *Smart City*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi indikator tujuan sebelumnya indikator sasaran dengan maksud menyesuaikan level indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.
2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi "Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan" untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan Pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi perbandingan/persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.
4. Sasaran baru 'meningkatnya masyarakat kota yang humanis' diukur dengan indikator Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah.
6. Penambahan indikator dan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya kapasitas kinerja birokrasi.
7. Penurunan target indikator indeks daya saing pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota

- Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter indeks daya saing pariwisata tersebut
8. Peningkatan target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
  9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR/PPKL/SAT/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
  10. Perubahan indikator Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan menjadi Persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.
  11. Perubahan Indikator Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan menjadi Persentase Penurunan Titik Genangan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan perubahan RPJMD diatas, Renstra Kecamatan Andir juga mengalami perubahan. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan berada di misi 1 dan 2. Pada misi 1, tujuan Kecamatan adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dan sasarannya adalah:
  - a. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan
  - b. Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Andir
2. Pada misi 2, tujuan Kecamatan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Andir
  - b. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Andir
3. Penambahan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Perubahan target persentase pemberdayaan masyarakat, dikarenakan ada perubahan cara perhitungan.

Perubahan tujuan dan sasaran serta indikator dan target Perubahan Renstra Kecamatan Andir Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan Kecamatan Andir  
Tahun 2018 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Realisasi		Target Kinerja Setelah Perubahan			Kondisi Akhir Periode Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing</b>											
1	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	%	75	33.33	56.36	56.36	59.19	61.00	61.00
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Andir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	75	33.33	56.36	56.36	59.19	61.00	61.00
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Andir	Persentase Siskamling RW aktif	%	n/a	n/a	n/a	50	61.11	72,22	72,22
<b>Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih</b>											
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Andir	Nilai	81,3	81,5	81,6	81,7	81,8	83,0	85,0
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Andir	Persentase Kelurahan Unggul	%	n/a	33.33	38.46	38.46	46.15	53.85	53.85
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Andir	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Andir	Nilai	81,3	81,5	81,6	81,7	81,8	83,0	85,0

## **5.1. Strategi Kecamatan Andir**

---

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

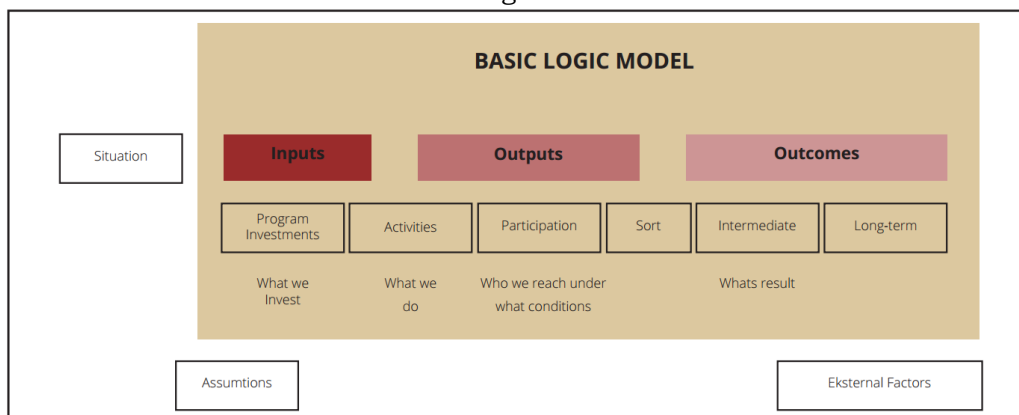
Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis Logic Model.

Logic Model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja. Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah.

Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan

dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1  
Logic Model



## 5.2. Analisis Logic Model

Untuk menentukan strategi yang tepat, dapat menggunakan **logic model** yaitu adalah suatu gambaran yang sistematis mengenai teori perubahan, ia merupakan studi kumulatif dari keterkaitan antara aktifitas, outcomes dan konteks, atau untuk melihat bagaimana dan mengapa sebuah program bekerja.

Dalam rangka melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan pada kementerian/ lembaga, pendekatan **logic model** dipandang cukup menjanjikan pemahaman para penyusun dokumen anggaran pada kementerian/ lembaga. **logic model** adalah gambaran visual logis dari suatu program yang menunjukkan rangkaian/ hubungan antara input, aktivitas, sampai dengan output dan outcome yang diharapkan sebagai respon terhadap suatu situasi yang dihadapi organisasi. Dengan pendekatan **logic model**, keterkaitan struktur anggaran dari program, kegiatan, output, komponen, dan jenis belanja, menjadi lebih logis/ relevan. Berikut ini adalah logic model yang disusun untuk menjelaskan keterkaitan program dan kegiatan Kecamatan Andir dengan RPJMD.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Andir sebagai berikut:



Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Sebelum Perubahan

<b>Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>			
<b>Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Melayani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat

Tabel 5.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Setelah Perubahan

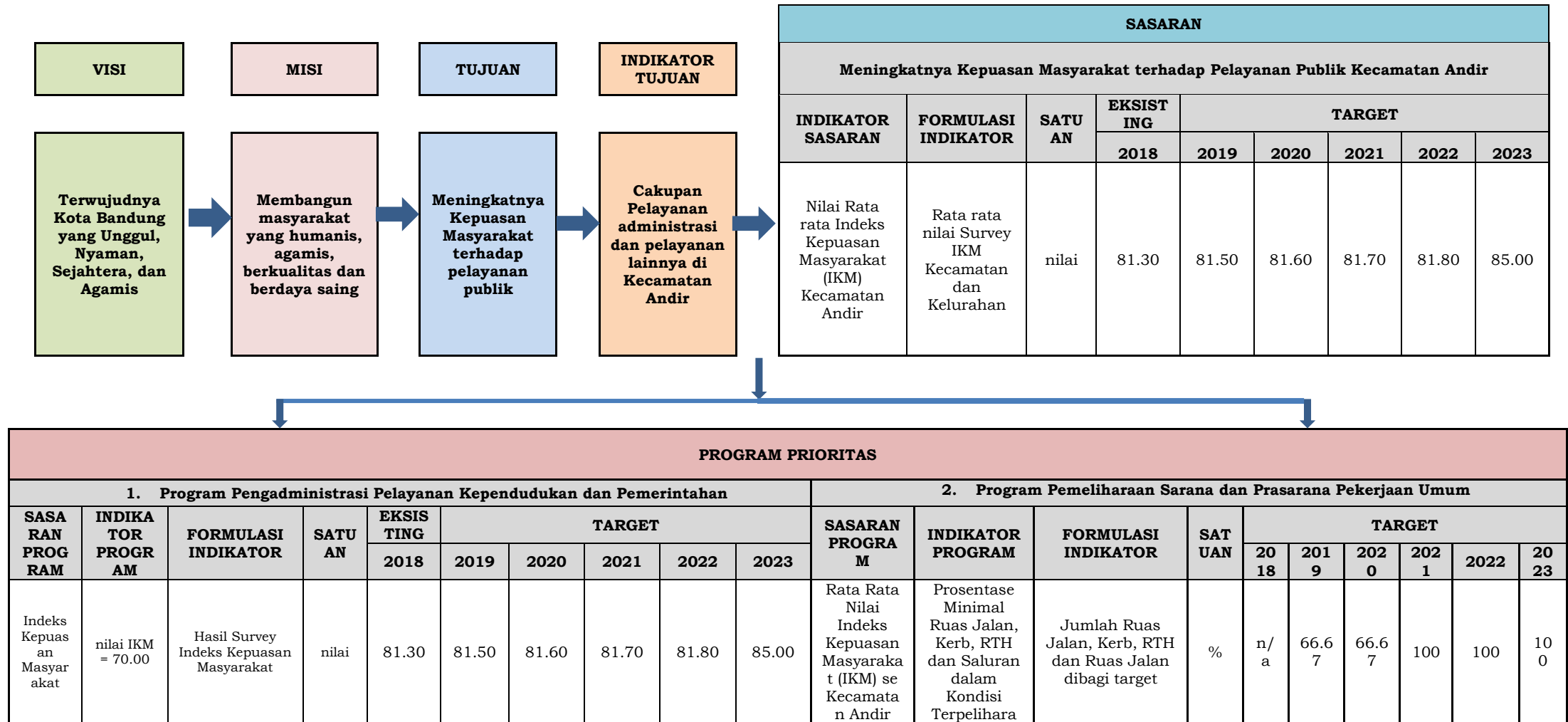
<b>Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>			
<b>Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Andir	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Andir	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif

<b>Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Andir	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Andir	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Untuk merealisasikan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan maka disusun logic model yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 5.1.

CASCADING KINERJA KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG SASARAN-1



PROGRAM PRIORITAS									
1. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSISTING	TARGET				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai IKM = 70,00	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	81.30	81.50	81.60	81.70	81.80	85.00

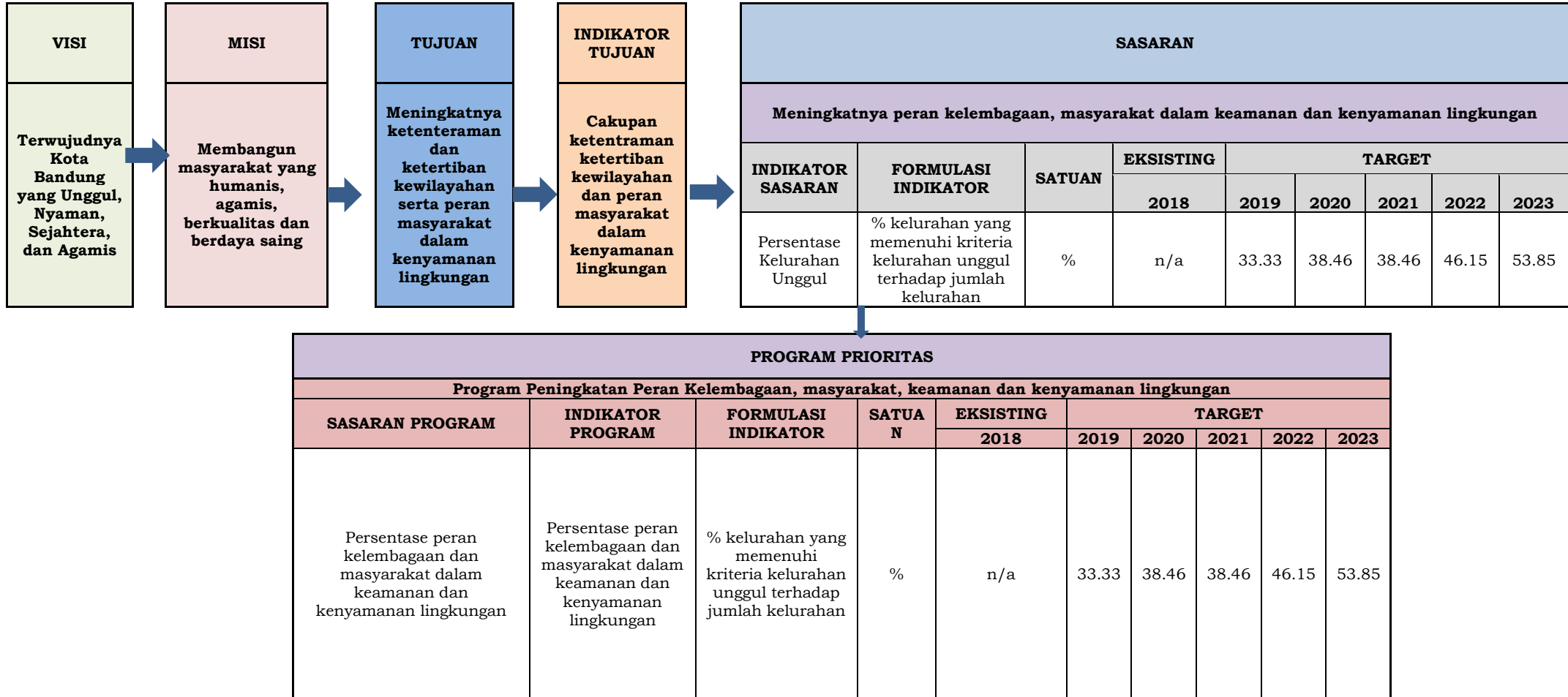
KEGIATAN								
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan /Output	Satuan	Existing	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pelayanan Publik	IKM Layanan Kependudukan	Indeks	81.3	81.5	81.6	81.7	81.8	85

Kegiatan Pembinaan RT RW								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan /Output	Satuan	Existing	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	%	N/A	100	100	100	100	100

PROGRAM PRIORITAS									
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum									
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	Satuan	Eksisting	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se Kecamatan Andir	Prosentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara	Jumlah Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Ruas Jalan dibagi target	%	n/a	66.67	66.67	100	100	100

KEGIATAN									
Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Existing	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Cakupan RTH Kecamatan terpelihara	Jumlah RTH kecamatan terpelihara	titik	n/a	7	7	7	7	7	
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Existing	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jalan	Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara	Meter	n/a	33761	33761	33761	33761	33761	
Drainase	Panjang drainase terpelihara	Meter	n/a	18138	18138	18138	18138	18138	
Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Existing	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Cakupan Panjang Kerb terpelihara	Panjang kerb terpelihara	Meter	n/a	6000	6000	6000	6000	6000	

Gambar 5.2.  
CASCADING KINERJA KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG SASARAN-2



PROGRAM PRIORITAS										
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan										
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSISTING	TARGET					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan	%	n/a	33.33	38.46	38.46	46.15	53.85	

KEGIATAN									
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Output	Satuan	Existing	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Siskamling RW	Persentase RW yang memiliki siskamling aktif	%	n/a	n/a	n/a	50	61.11	72.22	

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Output	Satuan	Existing	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
RW	Jumlah RW berdaya	RW	n/a	6	12	12	18	24	
Posyandu	Jumlah Posyandu Purnama	Posyandu	n/a	40	42	42	45	48	

PROGRAM PRIORITAS									
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSTING	TARGET				
					2018	2019	2020	2021	2022
Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan	%	n/a	33.33	38.46	38.46	46.15	53.85

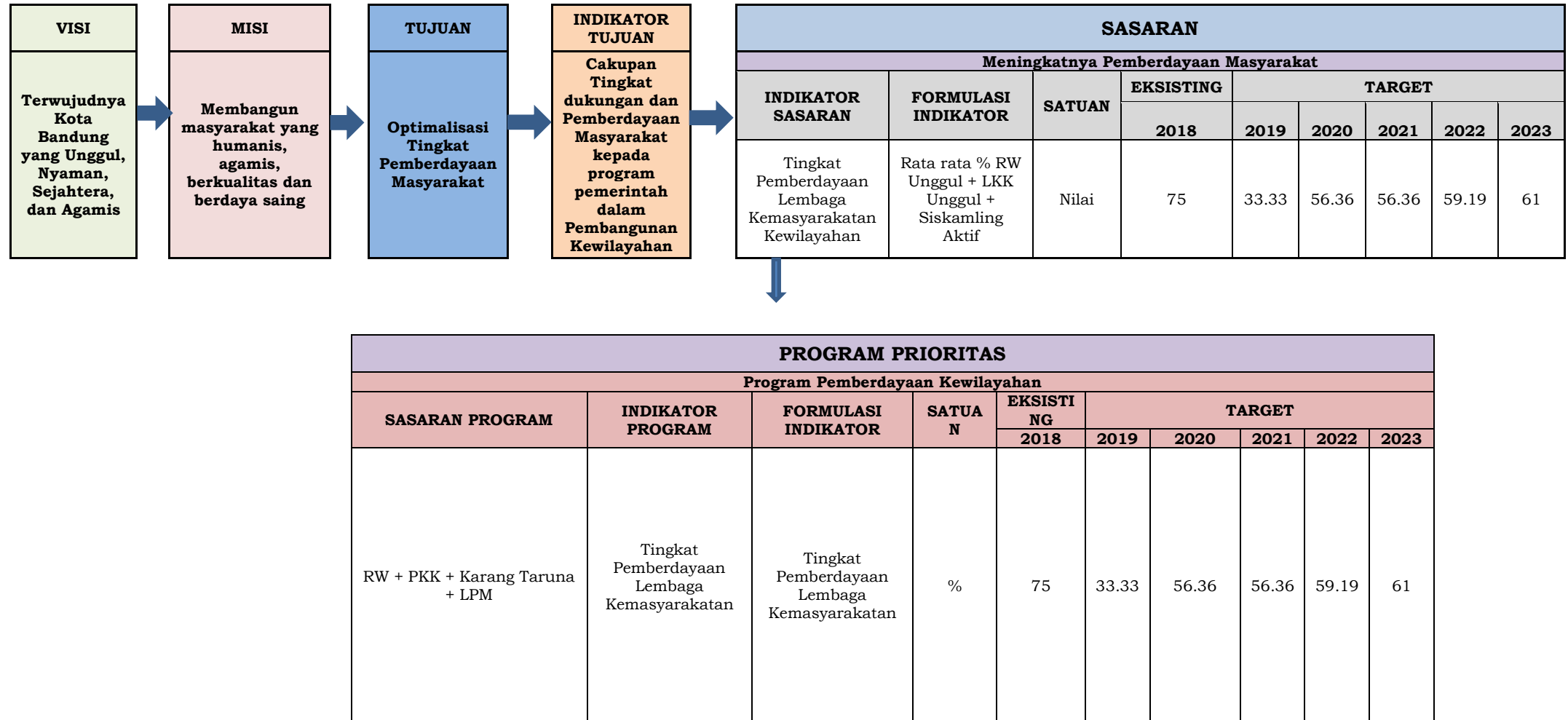
Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Existi ng	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022
RW	Jumlah RW siaga	RW	n/a	6	6	6	6	12
Kelurahan	Jumlah Kagana Kelurahan	Kelompok	n/a	0	1	6	6	6

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Existi ng	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022
Koperasi	Jumlah koperasi di tempat ibadah	Koperasi	n/a	6	1	1	1	1
Koperasi	Jumlah Koperasi Juara	Koperasi Juara	n/a	6	6	6	6	6

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Existi ng	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022
Kegiatan	1 Kegiatan musrenbang	Kegiatan	n/a	7	1	1	1	1



Gambar 5.3.  
CASCADING KINERJA KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG SASARAN-3



PROGRAM PRIORITAS									
Program Pemberdayaan Kewilayahan									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSISTING	TARGET				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
RW + PKK + Karang Taruna + LPM	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75	33.33	56.36	56.36	59.19	61

KEGIATAN									
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan /Output	Satuan	Existin g	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pemberdayaan RW	Jumlah RW Unggul	RW	n/a	10	16	16	22	26	

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan /Output	Satuan	Existin g	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pemberdayaan PKK	% PKK Unggul	%	n/a	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	

PROGRAM PRIORITAS									
Program Pemberdayaan Kewilayahan									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	EKSISTING	TARGET				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
RW + PKK + Karang Taruna + LPM	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75	33.33	56.36	56.36	59.19	61

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Exist ing	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pemberdayaan Karang Taruna	% Karang Taruna Unggul	%	n/a	33.33	33.33	66.67	66.67	66.67

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Exist ing	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pemberdayaan LPM	% LPM Unggul	%	n/a	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5



RENSTRA 2018-2023

BAB 6

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## 6.1. Program dan Kegiatan Renstra 2013-2018

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Dalam perencanaan strategis, program yang dibuat harus mempunyai korelasi antara aspek strategis dan operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan urusan dan program.

Perencanaan program yang akan dilaksanakan di kecamatan di Kota Bandung harus berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik yang ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: re-engineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Program kegiatan fasilitasi keuangan kecamatan meliputi revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionerisasi kegiatan pembangunan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia sebagai basis bagi upaya mendorong ekonomi kreatif, bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.
2. Pelayanan prima kepada segenap warga serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang aman dan nyaman.

3. Peningkatan kinerja birokrasi kecamatan.
4. Penggabungan lintas sektoral dan vertical dalam upaya optimalisasi daya dukung, pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

### **Program dan Kegiatan Lintas SKPD dan Kebijakan**

Secara umum, untuk program dan kegiatan lintas SKPD dapat dikelompokkan kedalam :

1. Program dan kegiatan yang langsung ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
2. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kinerja aparat.
3. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik.

### **Program dan Kegiatan**

Berikut adalah program dan kegiatan pada kecamatan Andir Kota Bandung yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi kecamatan Andir. Perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan, mulai dari Rakorbang hingga penetapan skala prioritas, antara lain secara umum sebagai berikut :

Rincian program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

**Tahun Anggaran 2014** dengan total anggaran belanja langsung Kecamatan Andir sebesar **Rp. 10.610.600.000,-** sebagai berikut :

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :**
  - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  - b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
  - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
  - e) Penyediaan alat tulis kantor
  - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

- g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
  - i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - j) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
  - k) Penyediaan makanan dan minuman.
  - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :**
- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
  - b) Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
  - c) Pengadaan Pengadaan Mebelair
  - d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
  - e) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. **Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**
- a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**
- a) Pembinaan Kinerja Aparatur
5. **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**
- a) Penyusunan system informasi terhadap layanan publik
6. **Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**
- a) Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
  - b) Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
  - c) Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
  - d) Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
  - e) Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.
  - f) Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**Tahun Anggaran 2015** dengan total anggaran belanja langsung Kecamatan Andir sebesar **Rp. 17.749.764.940,-** sebagai berikut :

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :**
  - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  - b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
  - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
  - e) Penyediaan alat tulis kantor
  - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  - g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
  - i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - j) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
  - k) Penyediaan makanan dan minuman.
  - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :**
  - a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
  - b) Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
  - c) Pengadaan Pengadaan Mebelair
  - d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
  - e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. **Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**
  - a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**
  - a) Pembinaan Kinerja Aparatur
5. **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

- a) Penyusunan system informasi terhadap layanan publik

**6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
- c) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun .

**7. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- d) Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
- e) Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- f) Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
- g) Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
- h) Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum.
- i) Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**8. Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Fasilitasi lingkup RW
- b) Fasilitasi lingkup PKK
- c) Fasilitasi lingkup Karang Taruna
- d) Fasilitasi Lingkup LPM

**Tahun Anggaran 2016** dengan total anggaran belanja langsung Kecamatan Andir sebesar **Rp. 16.537.777.926,-** sebagai berikut :

**1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.



- e) Penyediaan alat tulis kantor
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- j) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
- k) Penyediaan makanan dan minuman.
- l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- b) Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
- c) Pengadaan Pengadaan Mebelair
- d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
- e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. **Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**

- a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**

- a) Pembinaan Kinerja Aparatur

5. **Program peningkatan pengembangan sisem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
- c) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun .

6. **Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
- b) Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

- c) Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
- d) Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
- e) Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum.
- f) Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**7. Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Fasilitasi lingkup RW
- b) Fasilitasi lingkup PKK
- c) Fasilitasi lingkup Karang Taruna
- d) Fasilitasi Lingkup LPM

**Tahun Anggaran 2017** dengan total anggaran belanja langsung Kecamatan Andir sebesar **Rp. 17.518.224.090,-** sebagai berikut :

**1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- e) Penyediaan alat tulis kantor
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- j) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
- k) Penyediaan makanan dan minuman.
- l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- m) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

**2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang**

**meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
- b) Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor
- c) Pengadaan Pengadaan Mebelair
- d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
- e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

**3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**

- a) Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
- b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

**4. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
- b) Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- c) Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
- d) Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
- e) Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum.
- f) Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**5. Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Fasilitasi lingkup RW
- b) Fasilitasi lingkup PKK
- c) Fasilitasi lingkup Karang Taruna
- d) Fasilitasi Lingkup LPM

**Tahun Anggaran 2018** dengan total anggaran belanja langsung Kecamatan Andir sebesar **Rp. 14.904.291.926,04,-** sebagai berikut :

**1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- e) Penyediaan alat tulis kantor
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- j) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
- k) Penyediaan makanan dan minuman.
- l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- m) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
- b) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
- c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. **Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**

- a) Pengadaan pakaian KORPRI
- b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. **Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
- b) Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
- c) Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
- d) Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum.
- e) Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

f) Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat

**5. Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Fasilitasi lingkup RW
- b) Fasilitasi lingkup PKK
- c) Fasilitasi lingkup Karang Taruna
- d) Fasilitasi Lingkup LPM

Jumlah Belanja Langsung Periode 2014 -2018 Kecamatan Kidul dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1  
Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Andir  
Tahun 2014- 2018

No	Kecamatan	Realisasi Anggaran ( Rp )				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Andir	6,181,238,326	16,294,346,486	16,085,716,587	17,846,927,102	13,712,878,956

Sumber Data : SIMDA dari Tahun 2014 s.d 2018

**6.2. Rencana Program dan Kegiatan Renstra 2018-2023**

Adapun Kerangka Perencanaan Anggaran untuk Renstra Tahun 2018-2023 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 6.2  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Andir  
Sebelum Perubahan Tahun 2018- 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	2,473,644,734	100%	2,721,009,207	100%	2,993,110,128	100%	3,292,421,141	100%	3,621,663,255	100%	15,101,848,466	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	307,450,135	12 Lap	338,195,149	12 Lap	372,014,663	12 Lap	409,216,130	12 Lap	450,137,743	12 Lap	1,877,013,819	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Keg	1 Keg	55,000,000	1 Keg	60,500,000	1 Keg	66,550,000	1 Keg	73,205,000	1 Keg	80,525,500	1 Keg	335,780,500	Kec Andir	Kecamatan
		4.15.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	123 Unit	123 Unit	32,341,600	123 Unit	35,575,760	123 Unit	39,133,336	123 Unit	43,046,670	123 Unit	47,351,337	123 Unit	197,448,702	Kec Andir	Kecamatan
		4.15.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	421,233,600	12 Jasa Bulanan	463,356,960	12 Jasa Bulanan	509,692,656	12 Jasa Bulanan	560,661,922	12 Jasa Bulanan	616,728,114	12 Jasa Bulanan	2,571,673,251	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	53 Unit	53 Unit	34,410,000	53 Unit	37,851,000	53 Unit	41,636,100	53 Unit	45,799,710	53 Unit	50,379,681	53 Unit	210,076,491	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	105,653,507	12 Lap	116,218,858	12 Lap	127,840,743	12 Lap	140,624,818	12 Lap	154,687,300	12 Lap	645,025,226	Kec Andir	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	59,457,430	12 Lap	65,403,173	12 Lap	71,943,490	12 Lap	79,137,839	12 Lap	87,051,623	12 Lap	362,993,556	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	4 Laporan	4 Laporan	19,262,138	4 Laporan	21,188,352	4 Laporan	23,307,187	4 Laporan	25,637,906	4 Laporan	28,201,696	4 Laporan	117,597,279	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	7 Laporan	7 Laporan	663,918,755	7 Laporan	730,310,631	7 Laporan	803,341,694	7 Laporan	883,675,863	7 Laporan	972,043,449	7 Laporan	4,053,290,391	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	4 Laporan	4 Laporan	39,265,470	4 Laporan	43,192,017	4 Laporan	47,511,219	4 Laporan	52,262,341	4 Laporan	57,488,575	4 Laporan	239,719,621	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	4 Laporan	4 Laporan	28,530,000	4 Laporan	31,383,000	4 Laporan	34,521,300	4 Laporan	37,973,430	4 Laporan	41,770,773	4 Laporan	174,178,503	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.01.017	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 Laporan	12 Laporan	65,879,050	12 Laporan	72,466,955	12 Laporan	79,713,651	12 Laporan	87,685,016	12 Laporan	96,453,517	12 Laporan	402,198,188	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	7 Laporan	7 Laporan	161,243,049	7 Laporan	177,367,354	7 Laporan	195,104,089	7 Laporan	214,614,498	7 Laporan	236,075,948	7 Laporan	984,404,938	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.01.019	Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 Laporan	12 Laporan	480,000,000	12 Laporan	528,000,000	12 Laporan	580,800,000	12 Laporan	638,880,000	12 Laporan	702,768,000	12 Laporan	2,930,448,000	Kec Andir	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	100%	2,388,458,542	100%	2,627,304,396	100%	2,890,034,836	100%	3,179,038,319	100%	3,496,942,151	100%	16,939,912,921	Kec Andir	Kec + Kel
		4.05.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	2 unit	69,829,000	2 Unit	33,000,000	2 Unit	33,000,000	2 Unit	33,000,000	8 Unit	168,829,000	Kec Andir	Kec + Kel
		4.05.02.10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair	0	0	0	4 jenis	65,303,597	1 Jenis	88,000,000	1 Jenis	88,000,000	1 Jenis	88,000,000	5 Jenis	329,303,597	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.02.013	Dekorasi Pembangunan Gedung	Jumlah unit gedung yang didekorasi	1 Unit	1 Unit	230,750,000	1 Unit	300,000,000	3 Unit	250,000,000	0	0	0	0	4 Unit	780,750,000	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.	Jumlah unit bangunan terpelihara	2 Unit	2 Unit	164,921,299	7 Unit	750,000,000	7 Unit	750,000,000	7 Unit	750,000,000	7 Unit	750,000,000	7 Unit	3,164,921,299	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	59 Unit	59 Unit	686,239,600	59 Unit	754,863,560	59 Unit	830,349,916	59 Unit	913,384,908	59 Unit	1,004,723,398	59 Unit	4,189,561,382	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.02.042	Pembangunan Gedung Kantor.	Jumlah gedung yang direhab	6 Unit	6 Unit	1,306,547,643	1 Unit	7,000,000,000	0	0	0	0	0	0	6 Unit	8,306,547,643	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	0	100%	143,710,676	100%	158,081,744	100%	173,889,918	100%	191,278,910	100%	666,961,247	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	52 stell	38,578,176	52 stell	42,435,994	52 stell	46,679,593	52 stell	51,347,552	52 stell	179,041,315	Kec Andir	Kecamatan
		4.15.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0	0	156 stell	105,132,500	156 stell	115,645,750	156 stell	127,210,325	156 stell	139,931,358	156 stell	487,919,933	Kec Andir	Kecamatan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan ASN yang mendapat pembinaan	100%	100%	77,000,000	100%	84,700,000	100%	93,170,000	100%	102,487,000	100%	112,735,700	100%	470,092,700	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.05.02	Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 Paket	1 Paket	77,000,000.00	1 Paket	84,700,000	1 Paket	93,170,000	1 Paket	102,487,000	1 Paket	112,735,700	1 Paket	470,092,700	Kec Andir	Kec + Kel
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Andir	70	70	13,749,341,980	71	15,124,276,178	72	16,636,703,796	73	18,300,374,175.38	74	20,130,411,592.92	74	65,849,621,855.10		
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan			Persentase Kelurahan Unggul	N/A	N/A	7,855,737,480	16,67%	8,641,311,228	33,33%	9,505,442,351	50%	10,455,986,586	66,67%	11,501,585,244	66,67%	38,914,319,956		
		4.15.15	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	75%	75%	1,962,132,980	75%	2,158,346,278	75%	2,374,180,906	75%	2,611,598,996	75%	2,872,758,896	75%	11,979,018,056	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	64 RW	64 RW	1,962,132,980	65 RW	2,158,346,278	65 RW	2,374,180,906	65 RW	2,611,598,996	65 RW	2,872,758,896	65 RW	11,979,018,056	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.25.005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	-	435 kader	629,351,042	435 kader	692,286,146	435 kader	761,514,761	435 kader	837,666,237	435 kader	921,432,861	435 kader	3,842,251,047	Kec Andir	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Kewilayahan																	
		4.15.33.001	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota	-	107 kader/kel	320,510,000	107 kader/kel	352,561,000	107 kader/kel	387,817,100	107 kader/kel	426,598,810	107 kader/kel	469,258,691	107 kader/kel	469,258,691	Kec Andir	Kec + Kel	
		4.15.25.01	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/keurahan	-	86 Usaha / Klp / Org	95,456,200	86 Usaha / Klp / Org	105,001,820	86 Usaha / Klp / Org	115,502,002	90 Usaha / Klp / Org	127,052,202	95 Usaha / Klp / Org	139,757,422	95 Usaha / Klp / Org	582,769,647	Kec Andir	Kec + Kel	
		4.15.19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	-	180 orang	46,493,067.00	190 orang	51,142,374	195 orang	56,256,611	200 orang	61,882,272	210 orang	68,070,499	215 orang	283,844,823	Kec Andir	Kec + Kel	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Andir		Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se Kecamatan Andir	75	75	5,893,604,500	75,4	6,482,964,950	75,6	7,131,261,445	75,8	7,844,387,590	76	8,628,826,348	76	26,935,301,899	Kec Andir	Kec + Kel	
		4.15.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	75%	2,696,485,000	75,2%	2,966,133,500	75,5%	3,262,746,850	75,8%	3,589,021,535	76,2%	3,947,923,689	76%	7,416,567,640	Kec Andir	Kec + Kel	
		4.15.20.01	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	-	28 Laporan	67,785,000	28 Laporan	74,563,500	28 Laporan	82,019,850	28 Laporan	90,221,835	28 Laporan	99,244,019	28 Laporan	413,834,204	Kec Andir	Kec + Kel	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	-	100 %	2,628,700,000	100 %	942,476,500	100 %	1,036,724,150	100 %	1,140,396,565	100 %	1,254,436,222	100 %	7,002,733,437	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	-		3,197,119,500		3,516,831,450		3,868,514,595		4,255,366,055		4,680,902,660		19,518,734,259	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.42.015	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	-	370 m <sup>2</sup>	157,516,931	370 m <sup>2</sup>	173,268,624	370 m <sup>2</sup>	190,595,487	370 m <sup>2</sup>	209,655,035	370 m <sup>2</sup>	230,620,539	370 m <sup>2</sup>	961,656,615	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.42.014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	-	4500 m <sup>2</sup>	2,891,818,073	4500 m <sup>2</sup>	3,180,999,880	4500 m <sup>2</sup>	3,499,099,868	4500 m <sup>2</sup>	3,849,009,855	4500 m <sup>2</sup>	4,233,910,841	4500 m <sup>2</sup>	17,654,838,517	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.42.016	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	-	3.722 m <sup>2</sup>	147,784,496	3.722 m <sup>2</sup>	162,562,946	3.722 m <sup>2</sup>	178,819,240	3.722 m <sup>2</sup>	196,701,164	3.722 m <sup>2</sup>	216,371,281	3.722 m <sup>2</sup>	902,239,127	Kec Andir	Kec + Kel
Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat				Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan wilayah	75%	75%	10,957,459,207	75,4%	11,370,000,000	75,6%	12,420,000,000	75,8%	13,488,000,000	76%	13,110,000,000	76%	61,203,509,940	Kec Andir	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan kewilayahan	75%	75%	10,957,459,207	75,4%	11,370,000,000	75,6%	12,420,000,000	75,8%	13,488,000,000	76%	13,110,000,000	76%	61,203,509,940	Kec Andir	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.26	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75%	75%	10,815,509,940	75,4%	11,370,000,000	75,6%	12,420,000,000	75,8%	13,488,000,000	76%	13,110,000,000	76%	61,203,509,940	Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.26.01	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan lingkup RW	418 sub keg	418 sub keg	9,024,808,475	424 sub keg	9,570,000,000	418 sub keg	10,440,000,000	418 sub keg	11,310,000,000	418 sub keg	11,310,000,000	418 sub keg	51,654,808,475	Kec Andir	Kelurahan
		4.15.26.02	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan lingkup PKK	61 sub Keg	61 sub Keg	599,505,557	61 sub Keg	600,000,000	58 sub Keg	660,000,000	58 sub Keg	726,000,000	58 sub Keg	600,000,000	58 sub Keg	3,185,505,557	Kec Andir	Kelurahan
		4.15.26.03	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan lingkup Karang Taruna	38 sub keg	38 sub keg	590,870,907	38 sub keg	600,000,000	36 sub keg	660,000,000	36 sub keg	726,000,000	36 sub keg	600,000,000	36 sub keg	3,176,870,907	Kec Andir	Kelurahan
		4.15.26.04	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan lingkup LPM	42 sub keg	42 sub keg	600,325,001	40 sub keg	600,000,000	30 sub keg	660,000,000	30 sub keg	726,000,000	30 sub keg	600,000,000	30 sub keg	3,186,325,001	Kec Andir	Kelurahan
		4.15.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	-	100%	46,493,067											Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	-	180 orang	46,493,067,00												
		4.15.25	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi dan UKM Aktif	-	86,15 %	95,456,200											Kec Andir	Kec + Kel
		4.15.25.01	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/ kel	-	86 Usaha / Kip / Org	95,456,200												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				<i>uraian</i>															

Tabel 6.3  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Andir  
Setelah Perubahan Tahun 2018- 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Awal	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi akhir periode
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	56,36%	5.544.043.236	59,19%	7.078.247.500	61,00%	8.063.198.800	61,00%	Kec. Andir
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	56,36%	5.329.999.236	59,19%	6.773.635.300	61,00%	7.731.975.380	61,00%	Kec. Andir

<b>7.01.0 3.2.02 .02</b>	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	54 laporan	3.466.939.136	54 laporan	4.043.881.300	54 laporan	4.581.810.091	54 laporan	Kec. Andir
<b>7.01.0 3.2.02 .03</b>	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18 Laporan	1.863.060.100	18 Laporan	2.729.754.000	18 Laporan	3.150.165.289	18 Laporan	Kec. Andir
<b>7.01.0 3.2.03</b>	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	42 Unit	214.044.000	42 Unit	304.612.200	42 Unit	331.223.420	42 Unit	Kec. Andir
<b>7.01.0 3.2.03 .01</b>	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah Posyandu Purnama	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	36 Posyandu	190.094.000	36 Posyandu	236.800.000	36 Posyandu	256.630.000	36 Posyandu	Kec. Andir
<b>7.01.0 3.2.03 .04</b>	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Unit	23.950.000	6 Unit	67.812.200	6 Unit	74.593.420	6 Unit	Kec. Andir

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibeunying Kaler	7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Siskamling RW Aktif</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50%	1.292.092.000	61,11%	1.293.743.000	72,22%	1.429.442.300	72,22%	Kec. Andir
	7.01.04.2.02	<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Persentase Siskamling RW Aktif</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50%	1.292.092.000	61,11%	1.293.743.000	72,22%	1.429.442.300	72,22%	Kec. Andir



		7.01.0 4.2.02 .01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>Jumlah pembinaan siskamling RW</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	27 Siskamling RW	1.292.092.000	30 Siskamling RW	1.293.743.000	36 Siskamling RW	1.429.442.300	36 Siskamling RW	Kec. Andir
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kaler	7.01.0 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Kelurahan Unggul</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	38,46%	4.027.923.242	46,15%	4.343.231.890	53,85%	5.107.628.295	53,85%	Kec. Andir

7.01.0 2.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	1.832.818.000	100%	1.808.139.500	100%	1.988.645.450	100,00%	Kec. Andir
7.01.0 2.2.01 .02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	1.832.818.000	12	1.808.139.500	12	1.988.645.450	12	Kec. Andir
7.01.0 2.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	42.075.850	100%	93.207.650	100%	102.528.415	100,00%	Kec. Andir

7.01.0 2.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	42.075.850	5	93.207.650	5	102.528.415	5	Kec. Andir
7.01.0 2.2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	1.758.654.392	100%	1.727.388.700	100%	1.897.267.570	100,00%	Kec. Andir
7.01.0 2.2.03 .01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	1.758.654.392	7	1.727.388.700	7	1.897.267.570	7	Kec. Andir

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Panjang jalan dan saluran air terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	33761 Meter		33761 Meter		33761 Meter		33761 Meter	Kec. Andir
7.01.0 2.2.04	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	394.375.000	12	714.496.040	12	1.119.186.860	1200,00 %	Kec. Andir

		7.01.0 2.2.04 .03	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	394.375.000	12	714.496.040	12	1.119.186 .860	12	Kec. Andir
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying Kaler	7.01.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	1. Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	13.239.047.848	100%	15.029.762.2 64	100%	16.218.88 2.937	100%	Kec. Andir
				2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (non akumulasi)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90%		90%		90%		Kec. Andir	

	7.01.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administra si keuangan perangkat daerah</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	11.245.669.930	100%	12.532.908.2 75	100%	13.465.03 1.711	100%	Kec. Andir
	7.01.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	11.245.669.930	12	12.532.908.2 75	12	13.465.03 1.711	12	Kec. Andir
	7.01.0 1.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah sub Kegiatan Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	1	32.450.000	1	35.695.00 0	1	Kec. Andir

	7.01.0 1.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		-	12	32.450.000	12	35.695.000	12	Kec. Andir
	7.01.0 1.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	386.889.218	7	630.744.489	7	701.130.777	700%	Kec. Andir
	7.01.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	13.869.900	12	15.811.650	12	17.392.815	12	Kec. Andir

	7.01.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	115.545.368	12	305.430.325	12	335.665.358	12	Kec. Andir
	7.01.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	16.341.500	12	58.019.700	12	63.821.670	12	Kec. Andir
	7.01.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	154.456.200	12	159.676.400	12	176.277.640	12	Kec. Andir
	7.01.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	67.704.250	12	67.383.414	12	74.082.294	12	Kec. Andir



	7.01.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	18.972.000	12	18.036.000	12	19.839.600	12	Kec. Andir
	7.01.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	100	6.387.000	100	14.051.400	100	Kec. Andir	
	7.01.0 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	996.422.900	2	1.144.992.300	2	1.259.491.530	2	Kec. Andir
	7.01.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	124.817.700	4	126.591.500	4	139.250.650	4	Kec. Andir

	7.01.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan dan IT)	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	871.605.200	12	1.018.400.80 0	12	1.120.240 .880	12	Kec. Andir
	7.01.0 1.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah sub Kegiatan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	610.065.800	3	688.667.200	3	757.533.9 20	3	Kec. Andir
	7.01.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	535.299.200	100	566.954.200	100	623.649.6 20	100	Kec. Andir

		7.01.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	28.670.000	12	44.850.000	12	49.335.00 0	12	Kec. Andir
		7.01.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	46.096.600	7	76.863.000	7	84.549.30 0	7	Kec. Andir

### **Program Prioritas Tahun 2018- 2023**

Adapun yang menjadi Program Prioritas Tahun 2018-2023 adalah Program yang menunjang Tupoksi Kecamatan yaitu program/ kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan Pelayanan Masyarakat yaitu:

1. Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
4. Program yang berkenaan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yaitu Program Pemberdayaan Kewilayahan.



## KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN ANDIR

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Andir Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Andir Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Andir untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Andir Kota Bandung yaitu :

### Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul
2. Persentase siskamling RW Aktif
3. Persentase Kelurahan Unggul
4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Andir

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum dan sesudah Perubahan Kecamatan Andir Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Andir Kota**  
**Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
					ALASAN	FORMULAS I/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Andir	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Andir	Nilai	85	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Sekretariat kec, BPK, Inspek torat	Tindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK
2.	Meningkatnya peran kelembagaan	Persentase Kelurahan Unggul	%	53.85	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang	Kecamatan	<b>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di</b>

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUA	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
	n, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan				dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	memenuhi kriteria kelurahan unggul	<p><b>bawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada kepengurusan</li> <li>- Ada program kerja</li> <li>- Mengikuti pelatihan</li> <li>- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang</li> <li>- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat</li> </ul> </li> <li>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Kepengurusan</li> <li>- Gardu Sosial</li> <li>- Lumbung sosial</li> <li>- Peta Rawan Bencana</li> <li>- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana</li> </ul> </li> <li>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> </ol>

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUA	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							<p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- petunjuk arah ke masjid</li> <li>- ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alarm waktu sholat</li> </ul> <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p>



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUA	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>9. Bank sampah tiap Kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> </ul>

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUA	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan</li> <li>b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan</li> <li>c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</li> <li>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas</li> <li>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</li> <li>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</li> </ul> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> </ul>

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUA	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
								<p>- Ada AD/ART</p> <p>13. Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> </ol> <p>Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</p>
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	61	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	(% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul)/4	Kelurahan	<p><b>RW Unggul</b></p> <p><b>(Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)</b></p> <p><b>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga</li> </ol>

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUA	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
							<p>2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah</p> <p>3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R</p> <p>4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester</p> <p>5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna</p> <p>6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya</p> <p><b>50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <p>1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</p> <p>2. Urban Farming</p> <p>3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir)</p> <p>4. Laporan RW tepat waktu minimal form A :</p> <p>a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)</p>	

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUA	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)</li> <li>c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni</li> </ul> <p>5. Koperasi di Sarana ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Anggota</li> <li>b. Memiliki Kepengurusan</li> <li>c. Memiliki AD/ART</li> </ul> <p>6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah</li> <li>b. Kegiatan pengajian</li> <li>c. Mengaktifkan remaja masjid</li> <li>d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahturahmi</li> </ul> <p>7. RW berdaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada kepengurusan</li> <li>b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)</li> <li>c. Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa</li> </ul>

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUA	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
								(zakat, infak, shodakoh dan wakaf) 8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca) 9. 1 rumah 1 Kader Jumanti; 10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat 11. Taman Tematik ramah disabilitas 12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang; 13. 50 Penanaman Pohon 14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan; 15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan; 16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air; 17. Kelompok Lansia Sehat; 18. Posyandu Purnama; a. Kegiatan lebih dari 8 kali b. Kader lebih dari 5 orang c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % : - KIA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUA	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- KB</li> <li>- Imunisasi</li> <li>- Gizi</li> <li>- Pencegahan dan Penanggulangan Diare</li> </ul> <p>d. Ada Dana sehat</p> <p>19. RW Siaga Bencana/RW Siaga;</p> <p>20. Siskamling Aktif</p> <p><b>% PKK Unggul</b>  <b>Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK</li> <li>2. Melaksanakan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna</li> <li>3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan</li> </ol>

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUA	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
							4. Sosialisasi bina keluarga 5. Sosialisasi ketertiban lingkungan 6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 7. Koperasi PKK 8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah 9. Pembinaan Posyandu  <b>% Karang Taruna Unggul</b> <b>Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b>  1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna  2. Membentuk dan melaksanakan Kagana  3. Melakukan pelatihan UED SP	



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUA	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							4. Melakukan sosialisasi TTG 5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah 6. Pendataan PMKS dan PSKS 7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana 8. Event Olah raga 9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan)  <b>% LPM Unggul</b> <b>Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b>  1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUA	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
								2. Melaksanakan pembinaan RW siaga 3. Melaksanakan BBGRM 4. Pendataan profil kelurahan 5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan 6. Rembug warga kelurahan (Musrenbang tingkat kelurahan) 7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna. 8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Andir Kota**  
**Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab	Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	Pembangunan Kecamatan			Fungsi Kecamatan	dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	RPJMD.  <b>Lingkup kegiatan:</b> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							21. Pembinaan Posyandu 22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA 23. Melakukan pelatihan UEP 24. Pendataan PMKS dan PSKS 25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 26. Event Olah Raga 27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM 29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 30. Pendataan Profil Kelurahan 31. Rembug Warga/Pra Musrenbang 32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Andir	Persentase siskamling RW Aktif	%		Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kriteria Siskamling Aktif : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Andir	Persentase Kelurahan Unggul	%		Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab semua Kasi di Kecamatan	<p><b>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> </li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> </ul> </li> </ol>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Kegiatan Kangpisan, memenuhi salah satu atau lebih dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank Sampah</li> <li>- Pemilahan Sampah</li> <li>- Pemanfaatan Sampah</li> </ul> <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Andir	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Andir	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)



## **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Andir Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Andir Kota Bandung lima tahun kedepan.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Andir sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung, maka rencana strategis Kecamatan Andir merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Andir Kota Bandung.

Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Andir Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Andir harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Andir Tahun 2018-2023.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada di lingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Andir harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Andir Tahun 2018-2023.
4. RENSTRA Kecamatan Andir akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas,

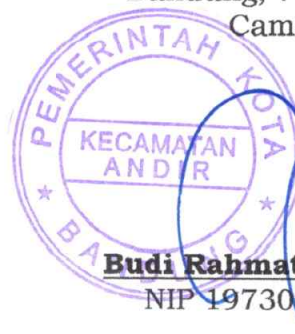


tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

5. Dalam rangka efektivitas, perubahan RENSTRA Kecamatan Andir tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Andir Kota Bandung sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Andir.

Bandung, 7 Desember 2021  
Camat Andir,



**Budi Rahmat Taufik, A.P., M.M.**  
NIP 19730711 199403 1 004